



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/345/AA.05/2021
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2020

31 Maret 2021

Yth. **Bupati Tulungagung**
di
Tulungagung

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Evaluasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah **untuk menilai tingkat akuntabilitas atas kinerja atau hasil kerja (outcome) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) dan berbudaya kinerja.**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung memperoleh nilai **76,80** atau predikat **BB**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,33	25,42
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,18	20,31
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,80	11,86
d.	Evaluasi Internal	10	6,23	6,84
e.	Capaian Kinerja	20	12,28	12,37
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,83	76,80
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Secara umum implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
2. Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah:
 - a. Beberapa rekomendasi penyempurnaan implementasi SAKIP yang telah disampaikan tahun lalu belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemkab Tulungagung belum signifikan;
 - b. Kualitas pelaporan informasi kinerja pada beberapa PD masih perlu ditingkatkan khususnya mengenai informasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan pencapaian target kinerja serta pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan PD sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
 - c. Mekanisme monitoring evaluasi reguler sudah baik, namun demikian monitoring evaluasi untuk fokus pembangunan belum diyakini keandalannya;
 - d. Secara umum capaian kinerja utama yang ditetapkan dalam PK tingkat Pemda tahun 2019 dapat berhasil dicapai, bahkan ada yg melampaui 100% untuk capaiannya. Namun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang target capaiannya dibawah 100%, dengan capaian kerjanya berkisar antara 64,88% - 99,20%.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat PD antara lain dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta memastikan agar pimpinan PD memanfaatkan laporan kinerja sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
2. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan, selain itu hasil reviu program digunakan sebagai masukan perencanaan periode berikutnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui

- pemanfaatan berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme *reward and punishment* kinerja, dan sebagainya;
4. Meningkatkan kolaborasi antar PD pengampu akuntabilitas kinerja sehingga pelaksanaan akuntabilitas kinerja lebih cepat dan terarah;

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Bupati Tulungagung beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

Agus Uji Hantara

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Timur.